

**STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH YANG TIDAK
ADA AHLI WARIS PASCA TSUNAMI DI ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh:
Ova Uswatun Nadia*, Yulkarnain Harahab.**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan terkait legalitas penguasaan tanah yang tidak diketahui ahli warisnya oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar, mengetahui dan menganalisis upaya yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Aceh Besar terhadap persoalan hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan normatif dan empiris dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, penelitian kepustakaan untuk data sekunder. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian yang diperoleh, *pertama*, Penguasaan tanah yang tidak diketahui ahli waris oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar legal karena dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, menetapkan bahwa Baitul Mal menjadi pihak pengelola dan pengawas tanah-tanah tak berwaris. Baitul Mal memperoleh *legacy* sebagai badan otoritatif untuk melakukan penelusuran, indentifikasi dan penetapan tanah tak berwaris melalui Mahkamah Syar'iyah. *Kedua*, Untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, Pemerintah Aceh Besar seharusnya melakukan upaya mencari informasi secara aktif, mengidentifikasi ahli waris, mengajukan penetapan tanah tak berwaris kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, mengajukan permohonan pembuatan buku tanah pada BPN Aceh Besar, dan mencatat semua tanah tak berwaris.

Kata Kunci: Kepemilikan, Penguasaan, Tanah, Ahli Waris, Tsunami.

* Mahasiswa Program S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**THE AUTHORIZATION AND OWNERSHIP STATUS OF THE LANDS
WITHOUT HEIRS IN ACEH POST – TSUNAMI
(Case Study in Aceh Besar District)**

By:

Ova Uswatun Nadia^{*}, Yulkarnain Harahab.^{**}

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze problems related to legality authorization of the land with no known heirs by Baitul Mal in Aceh Besar District, to analyze the effort that should be taken by the Government of Aceh Besar to address these legal issues.

The method used in this study is a combination of normative and empirical method with primary data collection by field research, and literature research for the secondary data. The data that has been obtained is analyzed qualitatively and then presented in the form of a logical and systematic description, analyzed to obtain clarity of problem solving, then the conclusions are drawn deductively from things that are general to specific ones.

The results of the research obtained, firstly, the authorization of lands that is not known to the heirs by Baitul Mal in Aceh Besar Regency is legal because in Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal, it stipulates that Baitul Mal is the manager and supervisor of lands without heirs. Baitul Mal has obtained the mandate as an authorized body to conduct search, identification and determination of non-inherited land through the Syar'iyah Court. Second, to resolve these legal issues, the Government of Aceh Besar must make active efforts to seek information, identify heirs, apply for land inheritance to the Syar'iyah Court of Aceh Besar, apply for land certificates at BPN Aceh Besar, and record all land without heirs.

Keywords : Ownership, Authorization, Lands, Heir, Tsunami

^{*} Student of Notary Master Degree Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

^{**} Lecturer of the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.